

Katalog : SetaraInstitute



Pengujian Konstitusionalitas Perda

Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebut—yang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah Agung—telah mengikis kesempatan norma-norma...



Mengadvokasi Hak Sipil Politik

Buku ini merupakan kumpulan artikel Hendardi yang tersebar di berbagai media. Semua dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang digelutinya sejak mahasiswa hingga kemudian aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), lalu mendirikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) serta Setara Institute. Tema yang penting disorot adalah hak berpendapat, satu dari tig...



Membela Hak Ekosob dan Melawan Korupsi

Pembangunan kerap kali berseberangan dengan hak asasi manusia. Hendardi berpendapat, rezim di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia pada masa Orde Baru, cenderung mengatasi masalah tersebut dengan menekan hak sipil dan hak politik masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Dia mengatakan, salah satu persoalan akut dalam pembangunan—pengentasan kemiskinan—membutuhkan peran rakyat. Namun, proyek padat modal o...



Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan

Tulisan-tulisan Hendardi yang terangkum dalam buku ini mendokumentasikan dan menganalisis periode sejarah penting ketika Indonesia mengalami perubahan dari Orde Baru menuju era Reformasi. Dengan gaya-gaya tulisan cenderung lugas, pembaca dengan jernih dapat memahami persoalan yang diajukan. Ambil misal artikel "Interpelasi DPR: Ajang Cuci Baju Kotor", 29 Juli 2000. Dia menyoroti sidang pengajuan hak interpelasi DPR k...



Jejak Aktivisme Hendardi

Pada 1978, Hendardi—yang masih “anak bawang” di Institut Teknologi Bandung—terkaget-kaget dengan keberanian para seniornya mengeluarkan pernyataan politik: tidak menghendaki lagi Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Penangkapan dan penahanan terhadap para pemimpin dan ratusan aktivis mahasiswa pun terjadi. Kampus diduduki tentara dan “dinormalkan”, rektor ITB dicopot dan diganti dengan rektorium. Perangkat Badan Koor...